



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR: 180/289/Hukum/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 180/01/HUKUM/2025
TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Karo Nomor: 180/01/Hukum/2025 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan aturan dalam pelaksanaan tugas pada beberapa perangkat daerah, maka Keputusan Bupati Karo sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 180/01/Hukum/2025 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
7. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Karo Nomor: 180/01/Hukum/2025 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 180 /289 /Hukum /2025
TANGGAL 05 - Juni , 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: 180/01/HUKUM/2025 TENTANG
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN
BUPATI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

No	Judul Rancangan Peraturan Bupati	Materi Pokok	Status		Dasar Hukum Pelaksanaan
			Baru	Ubah	
1	Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi (Pengusul: DPMPTSP)	<p>a. Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi</p> <p>b. Kriteria Pemberian Intensif Dan Kemudahan Investasi.</p> <p>c. Bentuk Pemberian Intensif Dan Kemudahan Investasi.</p> <p>d. Tata Cara Pemberian Intensif Dan Kemudahan Investasi.</p> <p>e. Jangka Waktu.</p> <p>f. Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi.</p> <p>g. Pemohon.</p> <p>h. Tim Verifikasi dan Penilaian</p> <p>i. Sanksi.</p>	✓	4	Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi.
2	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan	Aturan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat Serta Perlindungan	✓		Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Masyarakat (Pengusul: Satpol PP)	Petunjuk Operasional Polisi Pamong Praja Karo (Pengusul: Satpol PP)	Teknis Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo (Pengusul: Satpol PP)	Standar Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Kode Etik	Aturan Petunjuk Operasional Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo (Pengusul: Satpol PP)	Pengembangan (Pengusul: Dibudporapar)	Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kreatif	bertujuan	untuk:	✓	✓	Peraturan Menteri Dlam Negeri Republik Indonesia No. 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

	Daerah dan Retribusi Daerah (Pengusul: Disperindag)			Pemerintahan Daerah.
12	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika/ Prekusor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. (Pengusul : Bakesbang)	Tugas Wewenang Pencegahan, Antisipasi Dini, Penaganan dan Rehabilitasi, Partisipasi Masyarakat, Tim Terpadu dan Penghargaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Pelaporan dan sanksi Administrasi baik teguran lisan maupun teguran tertulis.	✓	2. Perda Kab. Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
13	Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2025 (Pengusul : Bappedalitbang)	Penerapan Inovasi Instansi Pemerintah Daerah	✓	Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022
14	Rencana Induk dan Peta Jalan Penajuan Iptek Tahun 2025-2029 (Pengusul: Bappedalitbang)	Rencana Induk dan Peta Jalan Penajuan Iptek Tahun 2025-2029 (Pengusul: Bappedalitbang)	✓	Peraturan BRIN No. 05 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.
15	Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 (Pengusul: Bappedalitbang)	Senubungan akan disusun RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil Pilkada Serentak, maka disusun Renstra PD	✓	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 (Pengusul: Bappedalitbang)	Dokumen rutin perencanaan tahunan	✓	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

			Penendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 (Pengusul : Bappedalitbang)	Dokumen rutin perencanaan tahunan	✓
18	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026 (Pengusul : Bappedalitbang)	Sehubungan Dengan Penyusunan RKPDA Tahun 2026, akan disusun Renja Perangkat Daerah	✓

19	Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Pengusul: Bappedalitbang)	Untuk menetapkan indikator kinerja utama pada RPJMD kab. Karo tahun 2025-2029 dan Renstra perangakat Daerah tahun 2025-2029	✓	- Peraturan Menteri Pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia nomor 89 tahun 2021 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pemerintah Daerah	Cara Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.	Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah
20	Strategi Sanitasi Kabupaten Karo Tahun 2025 2029 (Pengusul: Bappedalitbang)	Kebijakan dan Setrategi Pembangunan sanitasi secara komperhensif	✓	Peraturan Presiden No. 186 tahun 2014 Tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi	PP RI No. 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan	
21	Rencana Aksi Daerah Tujuan / Sustainable Development Goals Kabupaten Karo Tahun 2025-	Kebijakan dan strategis mencapai TPB/SDGs Kab. Karo Tahun 2025-2029	✓			

2029 (Pengusul: Bappedalitbang)				
22 Pusat Informasi Layak Anak (Pengusul: DP3AP2KB)		Penyelenggaraan sistem informasi elektronik dan non-elektronik yang bebas pelanggaran hak anak/ bahan berbahaya, seperti mengandung unsur kekerasan, diskriminasi, rasisme,ancaman,kevulgaran,kecabulan,radikalisme,atau ekpose data/diri anak.	✓	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Menteri Perempuan Dan perlindungan anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak.
23 Pusat Pembelajaran Keluarga (Pengusul: DP3AP2KB)	Pembentukan dan Penguatan Pelembagaan Puspaga, Memperkuat Kapasitas Puspaga Dalam Layana Pengkuatan Berbasis Hak Anak dan Mewujudkan Puspaga Menjadikan Lembaga Pelayanan Publik Untuk Pemenuhan Hak Anak	✓	- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. - Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. - Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. - Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	
24 Lembaga Pengasuh Tersandarisasi (Pengusul: DP3AP2KB)	Pelaksanaan Lembaga Pengasuhan Sesuai Standar Untuk Memberikan Mekanisme Pengasuhan Yang Terbaik Untuk Tumbuh Kembang Anak	✓	- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. - Peraturan Presiden No. 25	

				Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. - Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
25	Penyelenggaraan Khusus Bagi Anak (Pengusul: DP3AP2KB)	Perlindungan Anak-Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Manajemen Kasus Secara Umum, Mekanisme Pelaporan, Mekanisme Penanganan.	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak - Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
26	Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan Ternak (Pengusul: Distan)	Perlindungan Khusus Anak-Anak yang diberikan kepada Anak dalam Situasi Tertentu untuk Mendapatkan Jaminan Rasa Aman. Tujuannya adalah untuk Menjamin Terpenuhinya Hak-Hak Anak, seperti hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Prinsip Prinsip dasar perlindungan anak, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Non diskriminasi • Kepentingan yang terbaik bagi anak • Hak untuk hidup, Kelangsungan hidup, dan perkembangan. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dan Lembaga Negara Lainnya Berkewajiban dan Bertanggung Jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Karo

27	Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (Pengusul: Distan)	BPP Pertanian	Merupakan kelembagaan penyuluhan Pertanian Pemerintah yang berada di kecamatan; merupakan unit kerja nonstruktural pada dinas pertanian. yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian; melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPP kepala dinas pertanian menetapkan seorang penyuluhan pertanian sebagai kordinator BPP.	✓	- Undang-Undang No 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; - Undang-undang No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani; - Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi penyuluhan pertanian; dan
28	Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) (Pengusul: Distan)	STD-B diperuntukkan bagi perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar	✓	- Peraturan Menteri Pertanian No. 03 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.	
29	Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (Pengusul: Distan)	Rencana aksi daerah untuk mendukung kerberlanjutan pertanaman kelapa sawit di kabupaten karo	✓	Permentan No. 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang perubahan kedua atas Permentan No. 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan	
30	Pola Karir PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Pengusul : BKPSDM)	Sistem Pola Karir PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	✓	1. UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020	

31	Petunjuk Pelaksanaan Mutasi PNS atas Permintaan Sendiri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Pengusul : BKPSDM)	Pelaksanaan Mutasi PNS atas permintaan sendiri	✓	1. Permendagri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi PNS antar Kabupaten / Kota antar Provinsi dan antar Provinsi. 2. Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara Pelaksanaan Mutasi.
32	Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Pengusul : BKPSDM)	Berdasarkan Tata Cara dan Pembayarannya	✓	1. PP Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
33	Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Pengusul : BKDSDM)	Pemenuhan Kebutuhan Kompetensi aparatur yang mengurus sistem pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) serta manajemen pengetahuan yang diperoleh	✓	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
34	Penyelegaraan Perparkiran (Pengusul: DisHub)	Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penetapan Jenis dan Lokal Parkir, Penyelegaraan Parkir Tepi Jalan Umum, Penyelegaraan Parkir Khusus, Penyelegaraan Parkir Insidentil, Pengelolaan Parkir, Juru Parkir, Tata cara Penyelegaraan Parkir, Pemungutan Retribusi Parkir, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Penutup	✓	1. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 Tahun 2023 tentang Penyelegaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
35	Penguncian dan Pemindahan Kendaraan Bermotor (Pengusul: DisHub)	Ketentuan Umum, Penguncian Ban, Penderetan atau Pemindahan, Penyimpanan Kendaraan Bermotor, Pelaporan, Penutup	✓	1. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 Tahun 2023 tentang Penyelegaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

36	Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan (Pengusul: DisHub)	Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Rencana Umum Jaringan Trayek, Ketentuan Penutup	√		2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
37	Penyelenggara Pengujian Kendaraan Bermotor (Pengusul: DisHub)	Ketentuan Umum, Penyelenggara, Pengujian Kendaraan Bermotor, Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengujian Kendaraan Non KBWU, Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor, Fasilitas dan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, Sistem Informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Kalibrasi Pengujian Kendaraan Bermotor, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup	√		1. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum
38	Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Pengusul : DisHub)	Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Andalain, Prosedur Teknik Andalain, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup	√		1. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
39	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Kabupaten Karo (Pengusul : DisHub)	Ketentuan Umum, Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas, Pendanaan, Ketentuan Penutup	√		Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
40	Pemanfaatan Aset Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten	Ketentuan Umum, Maksud dan tujuan, Tata cara dan prosedur pemanfaatan aset, Jenis	√		Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 Tahun 2024 tentang

	Karo (Pengusul: DisHub)	pemanfaatan aset daerah, Tarif pemanfaatan, Ktentuan Penutup			Pajak daerah dan Retribusi
41	Perubahan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pengusul : DPMD)	Penghapusan Pelaksanan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019	✓	1. Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2023 tentang penetapan berahirnya status pandemi Corona Virus Disease 2019 di Indonesia. 2. UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	Daerah
42	Pembentukan Dusun. (Pengusul : DPMD)	Tata Cara Pembentukan Dusun	✓	Permendagri No. 1 Tahun 2017 Penataan Desa.	
43	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai Dana Desa Tahun 2025 (Pengusul : DPMD)	a. Prioritas Penggunaan dana desa Tahun 2025 b. Fokus Penggunaan dana desa tahun 2025	✓	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa	
44	Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun 2025 (Pengusul : DPMD)	Menetapakan Rincian ADD dan Rincian BBPD RD setiap desa di Kabupaten Karo	✓	PP Republik Indonesia No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2024 peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	
45	Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa (Pengusul : DPMD)	Pelaksanaan Transaksi Nontunai terhadap Penerimaan Desa Pengeluaran Desa dan Pembayaran Desa di lingkungan Pemerintah Desa	✓	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	
46	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Pengusul : DPMD)	Tata cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	✓	PP Republik Indonesia No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2024 peraturan Pelaksanaan UU	

				Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
47	Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa (Pengusul : DPMD)	Penyertaan Modal Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa	✓	Pasal 28 Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
48	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Kearsipan (Pengusul : Dinas Perpustakaan dan Arsip)	Tata cara pengelolaan arsip dinamis dan tata cara alih media arsip, Tata cara penyusutan arsip, Pengolahan Arsip Vital, Pengolahan Arsip Statis, ketentuan mengenai autentisitas arsip statis, Standar, mekanisme dan prosedur pelaksanaan pengawasan kearsipan, Tugas, fungsi dan tanggung jawab organisasi unit kearsipan, Kompetensi, pendidikan dan prilatihan arsiparis, standar minimal jumlah aseiparis dan penyediaan jaminan kesehatan dan tanggung jawab profesi, Penyediaan sarana dan prasarana kearsipan, perlindungan dan penyelamatan arsip milik daerah, kerja sama kearsipan, Sistem, mekanisme dan prosedur pemberian layanan jasa serta pertanggungjawaban pelaksanaan layanan jasa,	✓	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2023
49	Kode Kelasifikasi, Jadwal Retensi dan Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Pengusul : Dinas Perpustakaan dan Arsip)	Pengklasifikasian surat kedinasan, jadwal retensi arsip dan sistem keamanan dan akses arsip dinamis	✓	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 2. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan

					4. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
50	Penjabaran Anggaran 2026 (Pengusul : BKAD)	APBD Tahun	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo TA 2026	✓	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
51	Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (Pengusul : BKAD)		Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo	✓	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional
52	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Anggaran 2025 (Pengusul : BKAD)		Perubahan atas rincian pada peraturan bupati tentang penjabaran APBD Tahun anggaran 2025	✓	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
53	Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Pengusul : BKAD)		Tata cara pemberian dan besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas	✓	Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025
54	Penjabaran Perubahan Tahun Anggaran 2025 (Pengusul: BKAD)	APBD	Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo TA 2025	✓	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
55	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Pengusul : BKAD)		Perencanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah	✓	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
56	Tata Cara Penganggaran,		Mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan dan	✓	BAB II huruf D angka 2 huruf e

	Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo (Pengusul : BKAD)	Penatausahaan, Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	Penatausahaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial	angka 9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
57	Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2026 (Pengusul : BKAD)	Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2026	Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
58	Harga Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo TA. 2026 (Pengusul : BKAD)	Harga Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo TA. 2026	✓	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
59	Analisis Standar Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karo TA. 2026 (Pengusul : BKAD)	Standar Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Karo 2026	✓	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
60	Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karo TA. 2026 (Pengusul : BKAD)	Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karo TA. 2026	✓	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
61	Pertanggungjawaban APBD Tahun	Pertanggungjawaban APBD	✓	Peraturan Menteri Dalam Negeri

Anggaran 2024 (Pengusul : BKAD)				Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
62 Kebijakan Akuntansi (Pengusul : BKAD)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	✓		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
63 Kawasan Tanpa Rokok (Pengusul : Dinkes)	Kawasan Tanpa Rokok	✓		Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2024
64 Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome (Pengusul : Dinkes)	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	✓		Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2024
65 Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bencana Kabupaten Karo (Pengusul : BPBD)	Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karo	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran Serta lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran Serta lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018

66	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Karo (Pengusul : BPBD)	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Karo	✓	- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaha Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana - Peraturan Menteri Dalam	- Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana - Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana	tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota - Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana - Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana

67	Rencana Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) di Kabupaten Karo (Pengusul : BPBD)	Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Atas Suatu Bencana Yang Terjadi Berdasarkan Keputusan Bupati dan Analisa Pemenuhan Kebutuhan Tersebut	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana - Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana; - Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan

68	Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Pengusul : BPBD)	Pedoman Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota - Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

				- Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana
69	Petunjuk Teknis Pembayaran Honorarium Jasa Pendukung Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer Pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pratama, dan Sanggar Kegiatan Belajar Negeri di Kab. Karo Tahun Anggaran 2025 (Pengusul: Dinas Pendidikan)	Petunjuk Teknis Peraturan Bupati Karo tentang Honorarium Jasa Pendukung Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer Pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pratama, dan Sanggar Kegiatan Belajar Negeri Di Kab. Karo Tahun Anggaran 2025	✓	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
70	Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Karo (Pengusul: Diskominfo)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan SPBE 2. Proses bisnis 3. Data dan Informasi 4. Aplikasi SPBE 5. Infrastruktur SPBE 6. Keamanan SPBE 	✓	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. 2. Surat Edaran Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana

					SPBE.
71	Pusat Data di Pemerintah Kabupaten Karo (Pengusul: Diskominfo)	Pengelolaan Pusat Data dan Pengendalian	✓	-	1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
72	Pemanfaatan Jaringan Intra di Pemerintah Kabupaten Karo (Pengusul: Diskominfo)	Pedoman Pemanfaatan Jaringan Intra	✓	-	1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

					Birokrasi 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Berbasis Elektronik	Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Berbasis Elektronik
73	Sistem Penghubung Layanan di Pemerintah Kabupaten Karo (Pengusul: Diskominfo)			✓	-	1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
74	Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Pengusul: Bapenda)	Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah	✓		1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 3. Perda Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2024	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 3. Perda Kabupaten Karo
75	Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Pengusul: Bapenda)	Mekanisme dan Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah	✓		1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 3. Perda Kabupaten Karo	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 3. Perda Kabupaten Karo

76	Pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Pengusul: Bapenda)	Rtribusi	Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 3. Perda Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2024	Nomor 01 Tahun 2024
77	Pembebasan Masyarakat Rendah (Pengusul: Bapenda)	BPHTB bagi Berpenghasilan Rendah	Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 3. Perda Kab. Karo Nomor 01 Tahun 2024	
78	Pengelolaan Sampah (Pengusul: Dinas Lingkungan Hidup)	Pengaturan pengangkutan, dan pengolahan sampah dengan melibatkan masyarakat	Pengurangan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah dengan melibatkan masyarakat	✓	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 2. Perda Kab. Karo Nomor 02 Tahun 2021	
79	Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2026 (Pengusul: Bappedalitbang)	Dokumen rutin perencanaan tahunan	Dokumen rutin perencanaan tahunan	✓	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	
80	Indikator dan Formula Kinerja pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karo (Pengusul: Bappedalitbang)	Dokumen rutin perencanaan lima tahunan	Dokumen rutin perencanaan lima tahunan	✓	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	
81	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 (Pengusul: Bappedalitbang)	Dokumen rutin perencanaan lima tahunan	Dokumen rutin perencanaan lima tahunan	✓	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012	
82	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 (Pengusul: Bappedalitbang)	Dokumen rutin perencanaan lima tahunan	Dokumen rutin perencanaan lima tahunan	✓	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020	

83	Perubahan Peraturan Bupati Nomor. 04 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame (Pengusul: DPMPTSP)			✓	1. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2024 2. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2025
84	Sistem Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Pengusul: Diskominfo)			✓	1. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi SPBE 2. Pengendalian Teknis Keamanan 3. Pendanaan
85	Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Pengusul: Diskominfo)			✓	1. Kelembagaan Pengelolaan Pengaduan 2. Cara Penyampaian Pengaduan, Jenis dan Mekanisme Pengelolaan Pengaduan 3. Pemantauan dan Evaluasi 4. Pelaporan 5. Pembinaan dan Pengawasan 6. Pendanaan
86	Pedoman Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Atlet Atlet dan Pelatih Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Pengusul: Disbudporapar)			✓	1. Penghargaan Olahraga kepada Atlet Berprestasi 2. Penghargaan Olahraga Kepada Pelatih Berprestasi
87	Penetapan dan Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Karo (Pengusul: Disbudporapar)	Jenis Cagar Budaya, Kepemilikan, Penggunaan, Kompensasi, Tenaga Ahli, Pendaftaran, Register, Zonasi, Penghapusan dan Pengelolaan Cagar Budaya	✓		1. Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021

			3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2024	
88	Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan (Pengusul: Disbudporapar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. RAD Pelayanan Kepemudaan dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kepemudaan di Daerah 2. RAD Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan pelayanan Kepemudaan di Daerah 3. RAD Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk mengatur tentang kegiatan di bidang Kepemudaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2024-2026 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangan Undangan 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang 		

				Kepemudaan
89	Perubahan Peraturan Bupati Karo Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan (Pengusul: Dishub)	BAB I. Ketentuan Umum BAB II. Maksud dan Tujuan BAB III- BAB IX Rencana Umum Jaringan Trayek BAB X. Ketentuan Penutup	✓	1. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
90	Perubahan Peraturan Bupati Karo tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pengusul: DPMD)	1. Masa Jabatan Kepala Desa yang telah berubah dari 6 tahun menjadi 8 tahun 2. Calon Kepala Desa yang mendaftar hanya satu orang	✓	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
91	Pelaksanaan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Pengusul: DPMD)	1. Proses Pengusulan Pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati 2. Perangkat Desa yang berasal dari warga desa	✓	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
92	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membayai Pendidikan (Pengusul: Dinas Pendidikan)	Pemberian bantuan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membayai Pendidikan dan sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah kepada peserta didik	✓	1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022
93	Petunjuk Teknis Pemberian Insentif kepada Guru Sekolah Minggu dan Guru Mengaji di Kabupaten Karo (Pengusul: Kesra)	Besaran Insentif Guru Sekolah Minggu dan Guru Mengaji	✓	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

94	Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi dan/atau Pembangunan Rumah Ibadah di Kabupaten Karo (Pengusul: Kesra)	Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi dan/atau Pembangunan Rumah Ibadah Di Kabupaten Karo	✓	1. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama
95	Pemberian Bantuan Untuk Kemajuan Kebudayaan Di Kabupaten Karo (Pengusul: Kesra)	Menetapkan Besaran Bantuan Pemerintah untuk Mendukung Kegiatan Kebudayaan, Khususnya untuk Kegiatan Pesta Tahunan di Kabupaten Karo	✓	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
96	Pemberian Bantuan Beasiswa di Kabupaten Karo (Pengusul: Kesra)	Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Siswa dan Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Karo	✓	1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022



ANTONIUS GINTING